

## PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI APARATUR DESA DI KABUPATEN TANGERANG

**Nurdin**

Program Ilmu Politik FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*Corresponding Author: [nurdin.fisip@upnvj.ac.id](mailto:nurdin.fisip@upnvj.ac.id)

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article History:</b> Received May 25, 2025 Revised June 9, 2025 Accepted June 14, 2025</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Village Apparatus; Tangerang Regency Government; Pancasila as Ideology; Pancasila Values; Village Program and Activities</p>	<p>Permasalahan masih rendahnya pemahaman Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Di era globalisasi ideologi global yang telah membudaya hingga masyarakat desa menjadi tantangan bagi Aparatur Desa untuk menguasai nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Desa di Kabupaten Tangerang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam penyusunan program dan kegiatan yang dikelola pemerintah desa. Pelatihan ini menggunakan metode pendekatan pemaparan pembelajaran terkait penguasaan konsep, teori dan praktik untuk mencapai tujuan pelatihan. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa peserta telah mampu untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam program dan kegiatan sebagai rancangan dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang.</p> <p><b>ABSTRACT</b> <i>The problem of low understanding of Village Apparatus in the Tangerang Regency Government environment has become a concern for the Regional Government. In the era of globalization, global ideology that has become a culture in village communities has become a challenge for Village Apparatus to master the values of Pancasila as a guide in organizing village government. This training aims to improve the competence of Village Apparatus in Tangerang Regency in integrating Pancasila values into the preparation of programs and activities managed by the village government. This training uses a learning presentation approach method related to mastery of concepts, theories, and practices to achieve training objectives. The results of this training show that participants have been able to integrate Pancasila values into programs and activities as draft documents for village government development planning in Tangerang Regency.</i></p>

Copyright © 2025, The Author(s).  
This is an open access article  
under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Nurdin, N. (2025). PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI APARATUR DESA DI KABUPATEN TANGERANG. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 156–169. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i2.3952>

### PENDAHULUAN

Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 sebagai suatu kesepakatan para tokoh pendiri bangsa Indonesia dalam menjaga dan menyatukan keutuhan bangsa dan negara yang terdiri dari berbagai agama, keyakinan, suku, dan ras bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan pandangan mendasar dan mendalam (filosofi), ideologi, dan sumber hukum yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menata masyarakat, negara dan bangsa untuk hidup makmur sejahtera sebagaimana diikrarkan dalam pembukaan UUD 1945 (Ismail, 2018; Huda, 2018). Pancasila memiliki fungsi beragam dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sejalan dengan pembangunan nasional di Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai landasan filsafat dan dasar hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi harus bersumber dari 5 sila Pancasila (Setyawan, 2023; Sajid, 2018; Praditya, 2017). Kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di Indonesia. Paradigma ini menjadi arah dan tujuan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat tanpa memandang ras, etnis, dan agama ((Kusmawati et al, 2022; Naibaho et al., 2022; Triyadi, & Anggelina, 2022). Ketiga Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila

sebagai landasan moral dan etika politik dalam membangun politik berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil dan beradab (Asroni, 2023; Stefany, & Waspiyah, 2021). Keempat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang menjadi panduan hidup setiap individu, kelompok dan komunitas serta institusi negara. Pancasila menjadi dasar nasionalisme baik politik dan ekonomi, sosial budaya bagi setiap warga negara Indonesia (Morfit, 1981; Irawan, 2020; Maulida, et al., 2023; ).

Pancasila memiliki nilai-nilai yang relevan mulai dari perkembangan ideologi dunia, politik global, digitalisasi pemerintahan, hingga pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat desa (Adhayanto, et al., 2021; Samosir, et al., 2024). Ideologi Pancasila dapat mencegah pengaruh globalisasi nilai-nilai liberalisme, radikalisme dan intoleransi di lingkungan masyarakat desa (Gumbira, & Wiwoho, 2019; Mukaromah, et al., 2022; Arifin, et al., 2025). Peran aparatur desa yang paham nilai-nilai dasar Pancasila amat diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari ideologi-ideologi tersebut di lingkungan masyarakat desa. Para aparatur desa memiliki peran penting dalam membina nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat desa. Ada beberapa peran aparatur desa yang dapat diterapkan dalam rangka peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat desa. Pertama, aparatur desa dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila seperti menumbuhkan budaya gotong royong, kekeluargaan, kebangsaan (Caturiasari, et al., 2021), nilai ketuhanan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan (Purnama, & Azwar, 2020). Kedua, peran aparatur desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat warga desa (Aminullah, 2018) serta mengembangkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa masyarakat desa (Tome, 2020). Ketiga, aparatur desa dapat berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal budaya intoleransi dan radikalisme dalam masyarakat desa (Susilowati, et al., 2023; Pakpahan, et al., 2021; Kusumasari, 2024). Keempat, aparatur desa dapat berperan dalam melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam mengembangkan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan desa yang berkelanjutan desa di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan (Nugraha, et al., 2023; Purmono, et al., 2025), pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi desa, dan kesejahteraan warga desa (Ginanjari, et al., 2020).

Dengan mendasarkan pada pemikiran terhadap masih rendahnya pemahaman aparatur desa di wilayah Kabupaten Tangerang dalam menginternalisasi, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta melembagakan nilai-nilai Pancasila, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memandang perlu pelatihan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pada kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa, dan aparatur kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, maka pelatihan kompetensi ini diperlukan untuk mempercepat praktik nilai-nilai Pancasila yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan, program dan kegiatan kantor Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka pertanyaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana peran aparatur desa di wilayah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan desa. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Desa di wilayah Kabupaten Tangerang.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelatihan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila bagi Aparatur Desa di Kabupaten Tangerang menggunakan metode melalui pembelajaran, diskusi dan praktik di ruang belajar. Metode ini dipilih untuk memudahkan narasumber dalam mencapai tujuan pelatihan. Metode pembelajaran dilakukan dengan menjelaskan materi-materi terkait dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Otonomi Desa. Peningkatan pemahaman atas materi-materi ini penting untuk memberikan keterampilan dasar dalam konteks penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa yang

disinkronisasikan dengan Nilai-Nilai Pancasila. Pendekatan diskusi digunakan narasumber untuk menjangkau pendapat, argumentasi dan bukti empiris yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang. Sedangkan metode praktik digunakan narasumber untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Aparatur Desa untuk menganalisa permasalahan internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat desa. Pendekatan praktik ditujukan untuk memperkaya pengalaman para aparatur desa dalam memahami isu-isu pembangunan desa yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila.

Model yang digunakan adalah dengan melakukan simulasi baik individu dan kelompok dalam mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan desa berbasis Pancasila. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 1 (satu) pada Senin, 24 Agustus 2024 bertempat di Hotel Yasmin, Jalan Raya Binong No.8, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang—Provinsi Banten. Pelatihan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta aparatur desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Pelatihan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi aparatur desa di Kabupaten Tangerang telah menghasilkan adanya peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila aparatur desa. Indikator peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat diukur dari diskusi dan praktik simulasi selama kegiatan berlangsung. Peserta pelatihan telah memahami internalisasi nilai-nilai Pancasila, yang bersumber dari 5 Sila, dan mampu mengintegrasikan ke dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Tangerang (untuk lebih jelas terkait kompetensi ini dapat dibaca pada tabel 1 di bawah).

**Tabel 1.** Hasil Diskusi Kelompok Pengintegrasian Nilai-nilai Pancasila dalam Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa

Nilai-nilai Pancasila	Fungsi Pemerintahan		Program/Kegiatan
	Desa dalam	Pembangunan	
Ketuhanan Maha Esa	Yang	Memperkuat kelembagaan sosial	1. Pembinaan keagamaan bagi organisasi kemasyarakatan desa 2. Pembangunan tempat ibadah 3. Pengajian, dan perayaan hari besar keagamaan
Kemanusiaan Adil dan Beradab	yang	Memperkuat kelembagaan sosial	1. Pembangunan posyandu 2. Penanganan bencana 3. Penyelesaian konflik sosial 4. Bantuan sosial keluarga miskin 5. Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan
Persatuan Indonesia	Mengelola	dasar pelayanan	1. Gotong royong dalam kebersihan lingkungan desa 2. Pembangunan fasilitas umum akses air bersih, sanitasi, dan listrik 3. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, bantuan transportasi ke sekolah, dan sistem desa siaga

			4. Pembangunan pertanian bersama
			5. Keharmonisan antar warga dari berbagai latar belakang etnis dan budaya
			6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program desa
Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	- Mengelola pelayanan administrasi - Membuat regulasi		1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis 2. Pelaksanaan musyawarah Desa 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 4. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) 5. Pelaksanaan Musrenbangdesa 6. Penyusunan dokumen APBDesa 7. Penyusunan Peraturan Desa
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	- Menyediakan infrastruktur dasar - Memperkuat kelembagaan ekonomi - Memperkuat kelembagaan sosial		1. Penyediaan air bersih, irigasi tersier, jalan desa, jembatan desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa, dan sarana olah raga 2. Pembentukan Posyandu 3. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 4. Penyediaan bantuan permodalan untuk usaha kecil 5. Pelatihan keterampilan aparatur desa dan masyarakat desa 6. Pengembangan koperasi desa

Sumber: Hasil Diskusi dan Praktik

## PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi aparatur desa di Kabupaten Tangerang terbagi dalam 3 proses pembelajaran yaitu pembahasan materi, diskusi dan praktik. Materi pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan tema besar yaitu terkait pemahaman dasar terkait nilai-nilai Pancasila dan fungsi pemerintahan desa dalam konteks pelaksanaan otonomi desa. Materi pembelajaran disajikan melalui pendekatan sistem pemerintahan desa.

### *Pemaparan Materi Pembelajaran*

Materi-materi akan difokuskan pada konsep dan teori serta implementasi program dan kegiatan desa Fokus materi-materi ini adalah membahas konsep Dasar Negara, teori Pancasila Ideologi Negara, dan otonomi pemerintahan Desa.

**Tabel 2.** Proses Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Tangerang

<b>Materi</b>	<b>Isi Pembelajaran</b>	<b>Peningkatan Kompetensi</b>
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan</li> <li>- Sila-Sila Pancasila</li> <li>- Butir-butir Pengamalan Pancasila</li> <li>- Pancasila sebagai Dasar Negara</li> <li>- Pancasila sebagai Ideologi Negara</li> <li>- Pancasila di antara Ideologi Dunia</li> <li>- Kesimpulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta mampu memahami pembentukan Pancasila dalam perspektif sejarah</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menganalisa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan desa</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka terhadap tantangan globalisasi ideologi dunia</li> </ul>
Otonomi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan</li> <li>- Pengertian dan Landasan Hukum Otonomi Desa</li> <li>- Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</li> <li>- Desa dalam Kerangka Otda dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Tipologi Pemerintahan Desa</li> <li>- Fungsi Pemerintahan Desa</li> <li>- Kesimpulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan landasan hukum otonomi desa di Indonesia</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan asas penyelenggaraan pemerintahan desa</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan otonomi desa dalam konteks pemerintahan daerah</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan tipologi pemerintahan desa</li> <li>- Peserta mampu memahami dan menjelaskan fungsi pemerintahan desa</li> </ul>

### ***Diskusi Permasalahan Penerapan dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***

Diskusi antara Narasumber dan peserta pelatihan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi aparatur desa di Kabupaten Tangerang dipraktikkan dalam pengisian simulasi nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari 5 sila Pancasila dan fungsi pemerintahan desa. Adapun alur proses diskusi dan praktik pengisian program dan kerja pemerintahan desa dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pemahaman terhadap nilai-nilai sila ke-1 Pancasila menguatkan fungsi pemerintahan desa dalam memperkuat kelembagaan sosial masyarakat desa. Sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat disesuaikan dengan fungsi pemerintahan desa memperkuat kelembagaan sosial dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila ke-3 Persatuan Indonesia dapat diintegrasikan dalam penguatan kebangsaan dan toleransi tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan etnis dari setiap warga negara. Dalam praktiknya sila ke-3 sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam pengelolaan pelayanan dasar. Sila ke-4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat diintegrasikan ke dalam fungsi pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan pelayanan administrasi dan pembuatan regulasi desa yang dapat mendorong kehidupan demokrasi lokal. Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial.



**Gambar 1.** Diskusi antara Narasumber dan Peserta

Diskusi baik individu dan kelompok difokuskan pada pemecahan permasalahan pembangunan desa dengan mendasarkan pada filosofi Pancasila. Peserta diskusi dijelaskan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui butir-butir pengamalannya di dalam lingkungan pemerintahan desa (lihat gambar 1 terkait dengan suasana diskusi di dalam ruangan belajar). Target dari diskusi adalah bagaimana peserta di dalam kelompok berdiskusi isu-isu pembangunan yang dapat diselesaikan dengan perspektif dan pendekatan nilai-nilai Pancasila (untuk lebih jelas maka dapat dibaca pada Tabel 3 berikut).

**Tabel 3.** Diskusi Penerapan dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Desa

<b>Pancasila</b>	<b>Butir-Butir Pengamalan Pancasila</b>	<b>Permasalahan/Isu Pembangunan</b>
Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.</li> <li>3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.</li> <li>7. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan toleransi dan kerukunan beragama antar umat beragama di lingkungan desa</li> <li>- Tempat ibadah yang tidak layak</li> <li>- Minimnya fasilitas sarana dan prasarana tempat ibadah</li> <li>- Menguatnya pengaruh ideologi liberalisme melalui media sosial</li> </ul>
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.</li> <li>3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan desa</li> <li>- Kasus penyiksaan terhadap pekerja, buruh, anak kecil dan perempuan di lingkungan desa</li> <li>- Masih belum meratanya keadilan sosial dan ekonomi di desa</li> <li>-</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.</li> <li>5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.</li> <li>6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.</li> <li>7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</li> <li>8. Berani membela kebenaran dan keadilan.</li> <li>9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.</li> <li>10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.</li> </ol>	
Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.</li> <li>3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.</li> <li>4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.</li> <li>5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</li> <li>6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.</li> <li>7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya nasionalisme warga desa</li> <li>- Peningkatan rasa cinta bela negara di desa</li> <li>- Peningkatan persatuan dan kesatuan warga desa</li> </ul>
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.</li> <li>2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.</li> <li>3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.</li> <li>4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya praktik pembelian suara untuk menang dalam pilkades</li> <li>- Pemaksaan pendapat dalam penyusunan peraturan desa</li> <li>- Musyawarah desa yang tidak menghasilkan</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.</li> <li>6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil.</li> <li>7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.</li> <li>9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.</li> <li>10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.</li> </ol>	<p>pemecahan permasalahan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya nepotisme dalam pemilihan anggota dalam kelembagaan desa</li> </ul>
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.</li> <li>2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.</li> <li>3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.</li> <li>4. Menghormati hak orang lain.</li> <li>5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.</li> <li>6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.</li> <li>7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.</li> <li>8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.</li> <li>9. Suka bekerja keras.</li> <li>10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya angka kemiskinan di desa</li> <li>- Masih tingginya angka pengangguran di desa</li> <li>- Masih rendahnya tingkat pendidikan warga desa</li> <li>- Masih rendahnya tingkat kesehatan warga desa</li> </ul>

kemajuan dan kesejahteraan bersama.  
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sumber: BPIP RI, 2024 diolah penulis

### ***Praktik Pengintegrasian Nilai-nilai Pancasila Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa***

Praktik pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mendasarkan pada fungsi pemerintahan desa dalam pembangunan. Setidaknya pemerintah desa memiliki 6 (enam) fungsi pemerintahan yang terdiri dari pengelolaan pelayanan dasar, pelayanan administrasi, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, serta pembuatan regulasi desa. Peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan mereka dalam perencanaan pembangunan desa (untuk lebih jelas dapat dibaca dan dilihat pada tabel 4 dan gambar 2 di bawah).

**Tabel 4.** Praktik Pengintegrasian Nilai-nilai Pancasila dan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang

Nilai-nilai Pancasila		Fungsi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan	Program/Kegiatan
Ketuhanan Maha Esa	Yang	Diisi dengan fungsi pemerintahan desa yang relevan dengan Sila ke-1 Pancasila	- Terdapat 7 butir pengamalan dari Sila ke-1 - Analisalah program dan kegiatan pemerintahan desa dengan merujuk pada 7 butir pengamalan dari Sila ke-1
Kemanusiaan Adil dan Beradab	yang	Diisi dengan fungsi pemerintahan desa yang relevan dengan Sila ke-2 Pancasila	- Terdapat 10 butir pengamalan dari Sila ke-2 - Analisalah program dan kegiatan pemerintahan desa dengan merujuk pada 10 butir pengamalan dari Sila ke-2
Persatuan Indonesia		Diisi dengan fungsi pemerintahan desa yang relevan dengan Sila ke-3 Pancasila	- Terdapat 7 butir pengamalan dari Sila ke-3 - Analisalah program dan kegiatan pemerintahan desa dengan merujuk pada 7 butir pengamalan dari Sila ke-3
Kerakyatan Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	yang oleh	Diisi dengan fungsi pemerintahan desa yang relevan dengan Sila ke-4 Pancasila	- Terdapat 10 butir pengamalan dari Sila ke-4 - Analisalah program dan kegiatan pemerintahan desa dengan merujuk pada 10 butir pengamalan dari Sila ke-4

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Diisi dengan fungsi pemerintahan desa yang relevan dengan Sila ke-5 Pancasila	- Terdapat 11 butir pengamalan dari Sila ke-5 - Analisalah program dan kegiatan pemerintahan desa dengan merujuk pada 11 butir pengamalan dari Sila ke-5
---	---	---



**Gambar 2.** Praktik Penyusunan Program dan Kegiatan Desa Dibimbing oleh Narasumber

Dalam praktik ini peserta harus dapat menganalisa 6 (enam) fungsi pemerintahan desa dengan pendekatan dimensi kemampuan pemerintah desa baik keuangan dan teknis lain seperti sumber daya aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa. Keenam dimensi penyelenggaraan pemerintahan desa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi pengelolaan pelayanan dasar yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola pelayanan dasar yang berada di dalam lingkup kewenangannya, seperti ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini, bantuan transportasi ke sekolah, dan sistem desa siaga.
2. Dimensi pengelolaan pelayanan administrasi yaitu mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun beberapa administrasi perizinan yang berada dalam kewenangannya.
3. Dimensi penyediaan infrastruktur dasar yaitu mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola penyediaan infrastruktur dasar desa, seperti air bersih, irigasi tersier, jalan desa, listrik desa, polindes, sarana pendidikan anak usia dini, kantor desa, dan sarana olah raga.
4. Dimensi penguatan kelembagaan ekonomi yaitu mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam pengelolaan infrastruktur dasar dan penguasaan sumber daya alam lokal, dan penguatan daya tawar kolektif.
5. Dimensi penguatan kelembagaan sosial yaitu mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, seperti memperkuat organisasi sosial seperti posyandu, lembaga amil zakat, penanganan bencana, dan resolusi konflik.
6. Dimensi pembuatan regulasi desa yaitu mengukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola proses pembuatan regulasi sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya merevitalisasi aturan-aturan yang bersumber dari adat istiadat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila bagi Aparatur Desa di Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi yang penting untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi teknis bagi peserta. Kontribusi peningkatan pengetahuan dan wawasan terkait dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi aparatur desa untuk menganalisa permasalahan desa di berbagai bidang pembangunan. Sementara kontribusi teknis terkait dengan kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan pelatihan ini akan lebih bermanfaat bila seluruh aparatur desa dapat menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan teknis dan kompetensi mereka dalam bentuk nyata. Tentunya keputusan keberhasilan pelatihan ini akan sangat bergantung pada kemauan pimpinan baik di tingkat desa dan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini akan memberikan dampak positif bila didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di desa akan memberikan dampak nyata bila otonomi desa di Kabupaten Tangerang dapat dijalankan secara benar tidak dicampuri permasalahan politik baik dari elite desa, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang masih kental dengan budaya patronase baik sebelum dan setelah perhelatan politik seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa. Unsur terpenting adalah bagaimana aparatur desa bekerja berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa sebagai keputusan demokratis tertinggi dan mengikat seluruh pemangku kepentingan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan materi dan non materi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang atas undangannya dalam pelatihan ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Politik dan Pemerintahan Desa yaitu Ave Anak Anugrah, Anisa Octaningrum, dan Revo Linggar Vandito di Program Ilmu Politik FISIP Universitas Pembangunan Nasional Vetara Jakarta atas kontribusi mereka dalam menyiapkan materi-materi pelatihan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan izin dan surat tugas sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setyawan, V. (2023). Pancasila As A Philosophical Basis of Law Formation In Indonesia. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 2(1), 1-8.
- Ismail, F. (2018). Religion, State, and ideology in Indonesia: A historical account of the acceptance of Pancasila as the basis of Indonesian State. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 19-58.
- Sajid, D. A. (2018). Pancasila as the Basis for Legal Development in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 4(1), 69-94.
- Praditya, F. P. (2017). The Role of Pancasila as the Legal Basis in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 3(2), 105-120.
- Kusmawati, W. E., Putri, R. E., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a National Development Paradigm in Community, Nation and State Life. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(3), 33-37.
- Naibaho, Y. P. C., Sawitri, N. M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Development in Indonesia Government. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(4), 1-6.

- Triyadi, M. Y., & Anggelina, W. (2022). Pancasila as a Development Paradigm. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(6), 5-12.
- Asroni, A. (2023). Revitalization Of Pancasila Ethics As Moral Basis In The Life Of Nation And State. *Jurnal Scientia*, 12(02), 2036-2041.
- Stefany, R. A., & Waspiyah, W. (2021). The Importance of Pancasila as a System and Source of Political Ethics in Indonesia. *Journal of Creativity Student*, 6(1), 1-42.
- Morfit, M. (1981). Pancasila: The Indonesian state ideology according to the new order government. *Asian Survey*, 21(8), 838-851.
- Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, 1(2), 95-102.
- Irawan, A. D. (2020). Nationalism in a State Based on Pancasila. *PETITA*, 5, 133.
- Adhayanto, O., Nazaki, N., Rahmawati, N., Haryanti, D., Suwardi, N., & Pambudi, R. (2021). The strategy of strengthening Pancasila ideology in the digital age. *Pancasila and Law Review*, 2(2), 99-108.
- Samosir, H. A., Simanungkalit, A. V., Ramadhan, B. A., Amin, F. I., & Taufan, A. M. (2024). Implementing Pancasila Values in Facing Technological Developments and Digitalization in the Era of Society 5.0. *PKM-P*, 8(2), 424-429.
- Gumbira, S. W., & Wiwoho, J. (2019). The implication of the globalization on the Pancasila-based principles of local democracy in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(2), 361-378.
- Mukaromah, S. A., Gusmawan, A., & Munandar, J. (2022). The Lunge of Global Ideologies: The Challenges of Pancasila Ideology Education in the Middle of Global Existence in the Era of Globalization. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, 4(1), 1-30.
- Arifin, F., Tedjabuwana, R., Wiyono, S., & Abdullah, M. K. B. (2025). Indonesia's identity politics and populism: Disruption to national cohesion. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 166-175.
- Caturiasari, J., Mulyani, S., & Mahdarani, N. (2021). Penelitian Etnografi dalam Budaya Pesta Serang: Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Penguat Jati Diri Bangsa. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(2), 157-164.
- Purnama, F., & Azwar, A. (2020). Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda Karang Taruna Balai Tongah Koto. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 8(2), 126-133.
- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620-628.
- Tome, A. H. (2020). Membumikan Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa. *Jurnal Al-'Adl*, 13(1), 118-131.
- Susilowati, T., Andriyani, N., & Jupon, R. M. (2023). SOSIALISASI PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI MASYARAKAT PEKON GANJARAN KECAMATAN PAGELARAN. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(06), 1546-1552.
- Pakpahan, G. K., Salman, I., Setyobekti, A. B., Sumual, I. S., & Christi, A. M. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah radikalisme. *Kurios*, 7(2), 435-445.
- Kusumasari, A. A. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 4(1).
- Nugraha, L. G., Nurbani, E. S., & Pitaloka, D. (2023). Penguatan nilai-nilai Pancasila Dalam aPlikasi sDgs Desa Di Desa lembar selatan, kecamatan lembar, kabuPaten lombok barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Purmono, P. S., Munawwarah, F. N. U., Prabandari, D. A., & Putri, A. N. (2025). Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dengan Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Bina Desa*, 7(1), 110-122.

Ginjar, M. H., Rahman, R., Kohar, A., Pratiwi, I., Fatma, N., & Ardillah, M. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Beragama, Nilai-Nilai Kemandirian Bidang Ekonomi, Dan Budaya Dalam Bingkai Pancasila Di Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 185-205.